

DOI: doi.org/10.58797/teras.0402.05

Pola Kemitraan Pengembangan Wisata Perkebunan Kopi di Desa Ketapanrame Mojokerto

Dia Ayu Nur Alifah*, Indah Rachma Nur Halimah, Amanda Qolbi Shafira, Deasy Rizki Masruroh, Chantika Maria Margareta Putri, Agil Putri Fatmasari, Dana Rejasa, Muchtarrom Visandy

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Raya RungkutMadya, Gunung Anyar, Surabaya 60294, Indonesia

*Corresponding Email: 23041010020@student.upnjatim.ac.id

Received: July 23, 2025

Revised: October 1, 2025

Accepted: November 21, 2025

Online: December 30, 2025

Published: December 31, 2025

Mitra Teras: Jurnal Terapan Pengabdian Masyarakat

p-ISSN: 2963-2102

e-ISSN: 2964-6367



Abstract

This study aims to describe, identify, and analyze partnership patterns in the development of coffee plantation tourism in Ketapanrame Village, Trawas District, Mojokerto Regency. The focus of this study is on partnership patterns involving the village government, farmer groups, village-owned enterprises (BUMDes), academics, and private sector entities, based on three forms of partnership as outlined pseudo-partnership, mutualistic partnership, and conjugal partnership. This study employs a qualitative descriptive method with data collection techniques including field observation, interviews, and documentation. Research informants were selected through purposive sampling, including the Village Head of Ketapanrame, the Head of the Tourism Management Unit, and representatives of the coffee farmer group. This study finds that the development of coffee plantation tourism in Ketapanrame Village has progressed well through multi-stakeholder collaboration. The village government plays a key role in providing capital, institutional legalization, land utilization, and facilitating partnerships with external actors. Mutualistic and conjugative partnership models positively contribute to farmers' capacity building, institutional strengthening, and the promotion of coffee educational tourism, while pseudo-partnerships should be minimized through open communication and clear agreements. The study highlights the importance of targeted strategies to ensure partnership sustainability and optimize coffee tourism as a driver of the local economy.

Keywords: tourism development, partnership patterns, village, coffee plantation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis pola kemitraan dalam pengembangan wisata perkebunan kopi di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Fokus penelitian ini adalah pola kemitraan yang melibatkan pemerintah desa, kelompok tani, BUMDes, akademisi serta pihak swasta dengan mengacu pada tiga bentuk kemitraan yaitu kemitraan semu, kemitraan mutualistik dan kemitraan konjugasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling yang meliputi Kepala Desa Ketapanrame, Ketua Unit Pengelolaan Wisata dan perwakilan kelompok tani kopi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata perkebunan kopi di Desa Ketapanrame berjalan baik melalui kolaborasi multipihak. Pemerintah desa berperan dalam penyediaan modal, legalisasi kelembagaan, pemanfaatan lahan, serta fasilitasi kerja sama dengan mitra eksternal. Pola kemitraan mutualistik dan konjugasi berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas petani, penguatan kelembagaan, dan pengembangan wisata edukasi kopi, sementara potensi kemitraan semu perlu diminimalkan melalui komunikasi terbuka dan perjanjian yang jelas. Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi terarah untuk menjaga keberlanjutan kemitraan dan mengoptimalkan wisata kopi sebagai penggerak ekonomi lokal.

Kata Kunci: pengembangan wisata, pola kemitraan, desa, perkebunan kopi

PENDAHULUAN

Pembangunan desa wisata merupakan salah satu strategi yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Menurut Badan Pusat Statistik 2020 dalam (Iksal et al., 2024), dengan fakta bahwa lebih dari 43,3% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan, sehingga pengembangan potensi yang ada di desa menjadi sangat krusial. Desa wisata dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, melestarikan budaya lokal, serta menjaga lingkungan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengedepankan otonomi daerah, di mana desa diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk potensi pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021). Pengembangan desa wisata membawa keuntungan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Desa wisata memberi kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya lokal, menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab lingkungan. Pengembangan desa wisata juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi urbanisasi, seperti yang dinyatakan (Bagus, 2018). Desa wisata memberikan cara lain bagi masyarakat desa untuk mencari nafkah tanpa harus pindah ke kota.

Data menunjukkan bahwa 1.734 desa wisata ada di seluruh Indonesia pada tahun 2018, sebagian besar di Jawa-Bali dan Sumatera (Fenita et al., 2024) Desa Ketapanrame adalah salah satu desa yang menjadi desa wisata.

Desa Ketapanrame terletak di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, yang dikenal dengan keindahan alamnya dan potensi pertanian yang melimpah. Secara geografis, desa ini berada di ketinggian antara 700 hingga 1.200 mdpl, sehingga memiliki iklim yang sejuk dan cocok untuk pertumbuhan tanaman kopi. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2021, Desa Ketapanrame memiliki luas wilayah sekitar 1.500 hektar dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani kopi (Desa, 2020). Desa Ketapanrame, memiliki potensi besar untuk menjadi desa wisata, terutama dalam bidang perkebunan kopi. Ketapanrame memiliki banyak kekayaan alam yang dapat menarik wisatawan karena berada di wilayah yang mendukung. Desa ini memiliki 5.604 warga, kebanyakan petani, menurut Kantor Desa Ketapanrame. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki potensi besar untuk membantu mengembangkan wisata perkebunan kopi. Desa Ketapanrame pada 2023 telah meraih penghargaan nasional sebagai Desa Wisata Terbaik di Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), juara 1 Desa Wisata Terfavorit dalam ajang Desa Wisata Nusantara dan Ketapanrame menjadi peraih penghargaan Desa Wisata Terbaik dari Kemenparekraf di tahun yang sama (Mualim, 2023).

Keunikan Desa Ketapanrame terletak pada keberagaman produk pertanian, terutama kopi. Kopi Arabika dan Robusta yang ditanam di daerah ini memiliki cita rasa yang unik dan telah dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini menciptakan peluang untuk mengembangkan wisata perkebunan kopi yang menarik bagi wisatawan. Pengembangan desa wisata ini sejalan dengan program dari pemerintah untuk mendorong penciptaan desa wisata mandiri, di mana targetnya adalah 244 desa wisata tersertifikasi hingga tahun 2024 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021, 2021). Pemilihan Desa Ketapanrame sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kekayaan alam, budaya dan prestasi yang luar biasa. Keberadaan perkebunan kopi Arabika dan Robusta memberikan nilai tambahan untuk pertumbuhan pariwisata. Kopi Trawas dapat menjadi daya tarik wisata tersendiri karena cita rasanya yang unik dan sudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Wisata perkebunan kopi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru (Yulianto et al., 2023).

Minggu (23/6), Bupati Ikfina Fahmawati menghadiri tasyakuran petik kopi yang digelar di Pondok Karhutla, Desa Ketapanrame. Arifin menuturkan, agenda tahunan tersebut sekaligus menjadi penanda memasuki masa panen raya kopi. "Untuk jenis kopinya rata-rata 90 persen kopi arabika dan 10 persen robusta," jelasnya. "Kopi Ketapanrame ada perpaduan rasa asam dan manis-manis buah yang cukup dominan. Ini yang menjadi ciri khasnya dibanding dengan kopi-kopi yang lain," urainya. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Ketapanrame juga menjadi salah satu faktor yang mendukung pengembangan desa wisata. BUMDes berfungsi sebagai lembaga yang mengelola potensi ekonomi desa, termasuk pengembangan wisata (Putri & Riyadh, 2024). Dengan adanya dukungan dari pemerintah,

diharapkan BUMDes dapat berperan aktif dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pada potensi lokal. Menurut (Virdayanti et al., 2024), keberadaan BUMDes sangat penting untuk menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wisata di Desa Ketapanrame juga dapat membantu masyarakat lebih terlibat dalam mengelola sumber daya alam dan budaya lokal. Keberhasilan desa wisata bergantung pada partisipasi masyarakatnya dalam pembangunannya, karena mereka dapat berpartisipasi aktif dalam desain dan pengelolaan kegiatan wisata. Menurut Fischer dan Shipman (2013) dalam (Wibowo, 2023), keberhasilan program pariwisata berbasis komunitas sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengembangan. Meskipun telah dilakukan penelitian tentang pola kemitraan dalam pengembangan wisata perkebunan kopi, seperti yang dilakukan oleh Taman Ayu Agrowisata dengan petani kopi luwak di Bali, dan CV Belantih Coffee Farm dengan petani kopi arabika di Bali, serta studi kelayakan finansial kemitraan di Kabupaten Solok, penelitian khusus mengenai pola kemitraan dalam pengembangan wisata perkebunan kopi di Desa Ketapanrame, Mojokerto, masih terbatas.

Desa Ketapanrame telah mengembangkan wisata edukasi kopi di lereng Gunung Welirang, dengan melibatkan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mugo Lestari dalam pengelolaan perkebunan kopi seluas 67 hektare. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis pola kemitraan yang diterapkan antara pemerintah desa, KTH, dan pihak terkait lainnya dalam konteks pengembangan wisata perkebunan kopi (Mualim, 2023). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam mengenai pola kemitraan dalam pengembangan wisata perkebunan kopi di Desa Ketapanrame. Penelitian tersebut dapat mencakup analisis struktur kemitraan antara pemerintah desa, KTH, pelaku usaha wisata, dan pihak lain yang terlibat. Selain itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas kemitraan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan petani, keberlanjutan lingkungan, dan daya tarik wisata (Muhamimin, 2019). Dengan mengisi kesenjangan ini, penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan model kemitraan yang efektif dan berkelanjutan untuk pengembangan wisata perkebunan kopi di daerah lain.

Teori pola kemitraan (Sulistiyani, 2017) sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian pengembangan wisata perkebunan kopi di Desa Ketapanrame. Hal ini dikarenakan penelitian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, petani kopi, dan pelaku usaha wisata. Dalam konteks ini, teori pola kemitraan dapat membantu untuk memahami bagaimana kolaborasi antara pihak-pihak yang berbeda ini dapat terjalin untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan pola kemitraan yang diterapkan di Desa Ketapanrame, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan model kemitraan yang efektif dan berkelanjutan dalam pengembangan wisata perkebunan kopi.

Analisis bagaimana kemitraan ini dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di Desa Ketapanrame sangat penting untuk dipahami, mengingat pendekatan yang berkelanjutan adalah kunci dalam pengembangan pariwisata yang

ramah lingkungan. Selanjutnya, analisis terhadap struktur kemitraan yang terjalin antara berbagai pihak menjadi krusial. Dengan memahami bagaimana setiap pihak berkontribusi dan berinteraksi, penelitian ini dapat menyoroti dinamika dalam kemitraan yang ada. Serta apa dampak dari kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani kopi dan masyarakat setempat yang perlu dievaluasi (Larasati & Susrusa, 2020).

Tujuan penelitian mengenai pengembangan wisata perkebunan kopi di Desa Ketapanrame adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis pola kemitraan yang terjalin antara pemerintah desa, petani kopi, dan pelaku usaha wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi antara semua pihak tersebut, serta menilai struktur kemitraan yang ada dalam konteks pengembangan wisata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menggali seberapa besar partisipasi masyarakat memengaruhi keberhasilan pengembangan desa wisata, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi petani kopi dan masyarakat setempat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Arif et al., 2024) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat secara langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, sosial, atau budaya. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Pola Kemitraan Pengembangan Wisata Perkebunan Kopi di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan 3 fokus dalam pola kemitraan yang dikutip dalam teori Pola Kemitraan (Sulistiyani, 2017) yang berfokus pada: 1) Kemitraan Semu. 2) Kemitraan Mutualistik. 3) Kemitraan Konjugasi. Penelitian ini dilakukan di Perkebunan Kopi yang terletak di Jl. Raya Ki Ageng Tambak Boyo No. 50A, Ketapanrame, Kec. Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi di lapangan secara langsung, wawancara dengan informan, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dengan menentukan informan yang benar-benar mengerti yang akan diteliti. Pada penelitian ini, teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan berdasarkan pemahaman mereka tentang masalah yang diteliti. Informan yang kami pilih antara lain H. Zainul Arifin, S.E. selaku Kepala Desa Ketapanrame; Saifuddin selaku Ketua Unit Pengelolaan Wisata Ketapanrame; dan perwakilan kelompok tani kopi Desa Ketapanrame. Tehnik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif Miles and Huberman (Sugiyono, 2019) yang terdiri atas pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi.

HASIL DAN DISKUSI

Peran Pemerintah Desa Dalam Mendukung Pengelolaan Perkebunan Kopi

Pengembangan wisata perkebunan kopi di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto merupakan inisiatif strategis yang melibatkan berbagai aktor, meliputi pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), kelompok tani, serta mitra eksternal seperti pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Pola kemitraan yang terbangun menunjukkan pendekatan kolaboratif yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan perkebunan kopi dan pengembangan wisata berbasis agribisnis. Dalam perspektif teori kemitraan, keterlibatan multipihak ini menunjukkan upaya membangun relasi kerja sama yang tidak bersifat tunggal, melainkan saling melengkapi peran dan sumber daya. Dalam konteks ini, pemerintah desa memegang peran sentral tidak hanya dalam aspek operasional, tetapi juga sebagai aktor penggerak yang menentukan arah dan keberlanjutan kemitraan pengelolaan wisata perkebunan kopi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ketapanrame, pemerintah desa berperan aktif dalam memfasilitasi penggunaan lahan milik Perhutani melalui kerja sama dengan LMDH. Peran ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam memastikan legalitas serta keberlanjutan pengelolaan lahan melalui mekanisme kolaboratif yang melibatkan kelembagaan masyarakat. Selain itu, pemerintah desa menyalurkan dukungan modal melalui BUMDes guna menunjang keberlangsungan kelompok tani kopi sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Modal tersebut dimanfaatkan untuk penyediaan fasilitas pendukung produksi, seperti mesin cloting, mesin pilah kopi, dan mesin pengolahan air, yang sebagian besar diperoleh melalui bantuan pihak ketiga, antara lain CRS, kementerian terkait, BRI, dan Astra (Kumala et al., 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai fasilitator kemitraan yang menghubungkan petani dengan akses sumber daya eksternal. Dalam kerangka teori kemitraan, peran fasilitatif ini mencerminkan karakteristik kemitraan mutualistik, di mana setiap aktor memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusi dan kapasitasnya. Peran tersebut sejalan dengan konsep otonomi desa yang menempatkan pemerintah desa sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi lokal (Pambudi et al., 2018).

Kerja sama dengan berbagai pihak eksternal memperlihatkan fungsi pemerintah desa sebagai penghubung antara petani dan pemangku kepentingan lain, seperti sektor swasta dan akademisi. Upaya pengajuan bantuan peralatan dari perusahaan seperti BRI dan Astra secara nyata berkontribusi terhadap penguatan kapasitas produksi petani kopi. Pendekatan ini mencerminkan prinsip community-based tourism (CBT) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya sebagai dasar pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Wibowo, 2023). Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam mengoordinasikan pelatihan serta penyediaan teknologi untuk meningkatkan keterampilan petani, yang merupakan elemen penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Jika ditinjau

dari perspektif kemitraan, peran ini menunjukkan adanya upaya transisi dari relasi ketergantungan menuju penguatan kapasitas aktor lokal (Faidil et al., 2023), sehingga kemitraan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi mendorong keberlanjutan jangka panjang.

Selain aspek teknis, pemerintah desa turut memastikan bahwa pengelolaan perkebunan kopi selaras dengan visi pembangunan desa yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan BUMDes dan LMDH untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan Perhutani dikelola sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Pemerintah desa memfasilitasi dialog antara LMDH dan Perhutani guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi kehutanan, seperti yang diatur dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Fauzi & Saleh, 2020). Upaya ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemanfaatan lahan, tetapi juga menjamin akses legal petani dalam mengelola lahan perkebunan kopi. Dalam konteks teori kemitraan, peran ini mencerminkan fungsi pemerintah desa sebagai penyeimbang kepentingan antaraktor guna mencegah munculnya kemitraan semu yang berpotensi merugikan masyarakat lokal. Dengan demikian, pemerintah desa berperan sebagai katalis dalam menciptakan lingkungan kemitraan yang kondusif bagi pengembangan perkebunan kopi sebagai bagian dari strategi wisata edukasi (Mualim, 2023)

Pemerintah desa juga berperan aktif dalam memobilisasi sumber daya eksternal untuk mendukung pengembangan kapasitas petani kopi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa secara berkelanjutan mengajukan permohonan bantuan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan kopi. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam menjalin kemitraan strategis dengan berbagai aktor, termasuk pemerintah kabupaten, sektor swasta, dan akademisi. Pendekatan tersebut sejalan dengan model pentahelix dalam pengembangan pariwisata yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan (Mahadika et al., 2023). Dalam perspektif teori kemitraan, posisi pemerintah desa sebagai koordinator utama menunjukkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan relasi antaraktor serta memastikan bahwa kemitraan yang terbentuk bersifat mutualistik dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Regulasi Dan Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perkebunan Kopi

Pemerintah desa telah menetapkan sejumlah regulasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan kemitraan perkebunan kopi di Desa Ketapanrame. Regulasi yang diterapkan meliputi legalisasi kelompok tani, termasuk pembentukan badan dan kepengurusan, serta legalisasi kerja sama dengan pihak ketiga. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan kelompok tani sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan kemitraan. Legalisasi tersebut memberikan pengakuan formal terhadap kelompok tani sebagai entitas yang sah, sehingga memungkinkan mereka mengakses berbagai bentuk dukungan dari pemerintah, swasta, maupun akademisi. Langkah ini sejalan dengan prinsip otonomi desa yang

memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Dhian et al., 2023).

Salah satu regulasi penting yang diungkapkan dalam wawancara adalah legalisasi kerja sama dengan pihak ketiga yang berada di bawah pengawasan langsung pemerintah desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bentuk kerja sama yang terjalin memberikan manfaat yang adil bagi petani serta tidak menimbulkan praktik eksplorasi oleh pihak eksternal. Pemerintah desa melakukan pemantauan terhadap kontrak kerja sama antara kelompok tani dan mitra, seperti BRI dan Astra, guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan, termasuk peralatan pengolahan kopi, digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Regulasi ini mencerminkan pendekatan *protecting* dalam model pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada perlindungan kepentingan petani dari potensi ketimpangan dalam kemitraan (Faidil et al., 2023). Selain itu, mekanisme pengawasan ini juga berfungsi untuk mencegah praktik yang merugikan, seperti pembelian kopi di bawah harga pasar.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan regulasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan modal. Pemerintah desa mengakui bahwa hingga saat ini regulasi yang diterapkan masih terbatas pada legalisasi kelompok tani dan kerja sama dengan pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung pengelolaan perkebunan kopi secara menyeluruh. Salah satu aspirasi yang muncul adalah pembentukan koperasi desa sebagai lembaga resmi yang berperan dalam pengelolaan pembelian, pengemasan, dan pemasaran kopi. Koperasi tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai penggerak usaha yang mampu meningkatkan nilai tambah produk kopi petani. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi yang menekankan pentingnya koperasi desa dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan finansial petani (Azhari, 2019).

Pembentukan koperasi desa sebagai bagian dari regulasi jangka panjang mencerminkan visi pemerintah desa dalam menciptakan sistem pengelolaan perkebunan kopi yang lebih terstruktur. Dengan menempatkan kepala desa sebagai dewan pengawas, pemerintah desa berupaya memastikan bahwa kebijakan koperasi tetap berorientasi pada kebutuhan petani dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal (Jafaruddin et al., 2020). Selain itu, koperasi diharapkan mampu mengatasi tantangan pemasaran melalui pendampingan ahli dalam pengembangan kemasan dan strategi pemasaran produk kopi. Pendekatan ini mencerminkan prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis *enabling* dan *empowering*, di mana petani diberikan akses terhadap pengetahuan dan sumber daya guna meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

Namun demikian, keterbatasan modal masih menjadi hambatan utama dalam implementasi regulasi yang lebih luas. Pemerintah desa mengakui bahwa keterbatasan sumber daya finansial membatasi kemampuan untuk mengembangkan kebijakan tambahan, seperti penyelenggaraan pelatihan secara rutin dan pembangunan infrastruktur pengolahan kopi. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk memperkuat

kapasitas finansial desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah yang menekankan pentingnya alokasi dana bagi pembangunan desa (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021, 2021). Dengan dukungan yang memadai, pemerintah desa diharapkan mampu mengembangkan regulasi yang lebih holistik guna mendukung kemitraan perkebunan kopi, termasuk dalam aspek pemasaran, pengolahan, dan pengembangan wisata edukasi.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Welirang di Desa Ketapanrame dapat dianalisis menggunakan pendekatan pola kemitraan menurut Sulistiyan (2017), yang meliputi kemitraan semu, kemitraan mutualistik, dan kemitraan konjugasi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kemitraan yang terjadi dalam pengembangan wisata perkebunan kopi serta menilai implikasinya terhadap pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan wisata.

1. Kemitraan Semu

Berdasarkan temuan lapangan, kemitraan semu masih berpotensi muncul dalam pengembangan wisata perkebunan kopi di Desa Ketapanrame, khususnya ketika kerja sama antar pihak belum didasarkan pada kesamaan tujuan dan pembagian peran yang jelas. Kondisi ini terlihat dari keterlibatan sebagian pelaku usaha wisata yang lebih berorientasi pada keuntungan komersial tanpa melibatkan petani kopi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Situasi tersebut menunjukkan karakteristik kemitraan semu sebagaimana dikemukakan (Sulistiyan, 2017), yaitu kerja sama yang bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan hubungan yang setara. Dampaknya, manfaat ekonomi dan sosial yang diterima masyarakat menjadi tidak merata serta berisiko menurunkan keberlanjutan kerja sama akibat lemahnya komunikasi dan keselarasan visi antar pihak.

2. Kemitraan Mutualistik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan mutualistik mulai terbangun dalam pengembangan wisata perkebunan kopi di Desa Ketapanrame melalui kolaborasi antara petani kopi, pemerintah desa, dan mitra eksternal. Dalam pola ini, masing-masing pihak menjalankan peran yang saling melengkapi, di mana petani menyediakan sumber daya lahan dan pengetahuan lokal, pemerintah desa memberikan dukungan regulasi dan infrastruktur, sementara mitra eksternal berkontribusi dalam bentuk pendanaan, teknologi, dan promosi. Pola tersebut mencerminkan kemitraan mutualistik sebagaimana dijelaskan oleh (Sulistiyan, 2017) yaitu hubungan kerja sama yang memberikan manfaat timbal balik bagi seluruh pihak yang terlibat. Keberadaan pola ini berkontribusi positif terhadap penguatan kapasitas petani, peningkatan daya tarik wisata edukasi kopi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

3. Kemitraan Konjugasi

Selain kemitraan mutualistik, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan penerapan kemitraan konjugasi dalam pengembangan wisata perkebunan kopi di Desa Ketapanrame. Pola ini terlihat dari adanya proses transfer pengetahuan dan keterampilan kepada petani kopi melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan akademisi maupun lembaga pendukung lainnya. Melalui proses tersebut, petani tidak hanya berperan sebagai

penyedia bahan baku, tetapi juga mulai mengembangkan kapasitas sebagai pengelola wisata dan pelaku usaha kopi. Kondisi ini sesuai dengan konsep kemitraan konjugasi menurut (Sulistiyani, 2017) di mana kerja sama diarahkan untuk saling melengkapi kelemahan dan mendorong kemandirian mitra. Dengan demikian, kemitraan konjugasi berperan penting dalam membangun keberlanjutan pemberdayaan masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap mitra eksternal.

Meskipun ketiga pola kemitraan tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapannya di Desa Ketapanrame masih menghadapi sejumlah tantangan. Kemitraan semu berpotensi muncul akibat kurangnya transparansi, lemahnya komunikasi, serta belum adanya kesepahaman yang kuat mengenai tujuan dan pembagian peran antarpihak. Sementara itu, penguatan kemitraan mutualistik dan konjugasi membutuhkan komitmen jangka panjang serta dukungan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan, maupun infrastruktur pendukung. Tanpa pengelolaan kemitraan yang terarah, kondisi ini berisiko menurunkan efektivitas kerja sama dan menghambat keberlanjutan pengembangan wisata perkebunan kopi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kemitraan yang lebih sistematis. Pertama, membangun mekanisme komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antarpihak guna mencegah berkembangnya kemitraan semu. Kedua, menyusun perjanjian kerja sama yang jelas terkait pembagian peran, tanggung jawab, dan manfaat sebagai dasar penguatan kemitraan mutualistik. Ketiga, menyediakan program pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal, sehingga kemitraan konjugasi dapat mendorong kemandirian petani kopi. Dengan penerapan strategi tersebut, pengembangan wisata perkebunan kopi di Desa Ketapanrame diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata perkebunan kopi di Desa Ketapanrame dilaksanakan melalui pola kemitraan yang melibatkan berbagai aktor, meliputi pemerintah desa, kelompok tani, BUMDes, akademisi, serta sektor swasta. Kolaborasi multipihak tersebut berkontribusi positif dalam mengembangkan potensi wisata berbasis perkebunan kopi sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah Desa Ketapanrame memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam pemberdayaan masyarakat, terutama melalui penyediaan dukungan modal, penguatan dan legalisasi kelembagaan, serta peran fasilitatif dalam menjembatani kerja sama dengan mitra eksternal. Tanpa pengelolaan yang terarah, kemitraan berisiko berkembang secara tidak seimbang dan kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kemitraan yang mencakup peningkatan komunikasi antarpihak, penyusunan perjanjian kerja sama yang jelas terkait pembagian peran dan manfaat, serta penyediaan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat lokal. Dengan strategi tersebut,

pengembangan wisata perkebunan kopi di Desa Ketapanrame diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

REFERENSI

- Arif, R., Yochanan, Ilham, S., & Hery, P. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (I. Bambang (ed.); 1st ed.). Saba Jaya.
- Azhari, A. (2019). Model Pemberdayaan Bumdes Dan Solusi Pembangunan Ekonomi Desa: Suatu Kajian Literatur. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 1(2), 83–96. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.702>
- Bagus, S. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Bali Membangun Bali Jurnal Bappeda Litbang*, 1(1), 1–30. <http://www.berdesa.com/apa-beda-desa-wisata-dan-wisata-desa>
- Desa, K. (2020). Profil Desa Ketapanrame. *Desa Ketapanrame*. <https://ketapanrame.desa.id/>
- Dhian, S., Dani, P., Novarezta, R., & Wahyuni, M. (2023). Strategi Pengembangan Lahan Perkebunan Kopi Desa Wonosalam Dusun Mangirejo Sebagai Camping Ground Dengan Konsep Ekowisata. *Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara*, 2(2), 48–55. <https://doi.org/10.58374/jmmn.v2i2.148>
- Faidil, T., Dwi, E., Rafnel, A., & Mizi, S. (2023). Kelayakan Finansial Usaha Perkebunan Kopi Arabika Rakyat Melalui Pola Kemitraan Di Kabupaten Solok Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 7(4), 1421–1439. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.04.20>
- Fauzi, M. I., & Saleh, S. (2020). Campakamulya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung the Tradition of the Cultivation of Organic Coffee Gunung Puntang As a From of Development of Cultural Tourism Bassed on Local Wisdom in the Village of Campakamulya , Kecamatan Cimaung , Kabupaten Bandung P. *Jurnal Budaya Etnika*, 4(2), 126–140.
- Fenita, M., Adetiya, P., & Jemi, W. (2024). Analisis Rantai Pasok Kopi Pada Kelompok Tani Kopi Rejo Di Desa Wisata Gombengsari Banyuwangi. *Journal of Tourism and Economic*, 7(1), 39–50. <https://doi.org/10.36594/jtec/jr959t60>
- Iksal, Ganis, S., Yeeni, F., Jajang, M., Tasya, H., & Muahmmad, F. (2024). Penyuluhan dan Pelatihan Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penerapan Teknologi Informasi di Pedesaan. *Anditek Nusantara*, 6(1). <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Abditek%0APenyuluhan>
- Jafaruddin, N., Noor, T. I., & Karyani, T. (2020). Pengembangan Agrowisata Kopi Berbasis Masyarakat (Cbt) Di Kawasan Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(2), 996–1005. <https://doi.org/10.25157/ma.v6i2.3652>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). Pedoman Desa Wisata. *Pedoman Desa Wisata KEMENPAREKRAF 2019*, 1–94.
- Kumala, G. B. W. N., Raharjo, A. N., Musleh, M., & Lubis, L. (2024). Model Kolaborasi

- Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Berbasis Pentahelix. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 137–157. <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15366>
- Larasati, N. L. M. B., & Susruska, K. B. (2020). Pola Kemitraan antara Taman Ayu Agrowisata dengan Petani Kopi Luwak. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, 9(2), 155–163. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/JAA/article/view/62454>
- Mahadika, H., Haniek, L., Trenggono, Dyan, P., & Julian, P. (2023). Model Pengembangan Agrowisata Berbasis Kopi Sebagai Daya Tarik Wisata Desa Wisata Colo Kudus. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 19(2), 104–120. <https://doi.org/10.56910/gemawisata.v19i2.316>
- Mualim. (2023). Desa Ketapanrame Kembangkan Wisata Edukasi Kopi di Lereng Gunung Welirang. *Kolom Desa*. <https://kolomdesa.com/desa-ketapanrame-kembangkan-wisata-edukasi-kopi-di-lereng-gunung-welirang-29184/>
- Muhaimin, H. (2019). Tata Kelola Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.296>
- Pambudi, S. H., Sunarto, N., & Setyono, P. (2018). Strategi Pengembangan Agrowisata dalam Mendukung Pembangunan Pertanian - Studi Kasus di Desa Wisata Kaligono (Dewi Kano) Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(2), 165. <https://doi.org/10.21082/akp.v16n2.2018.165-184>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021, Pub. L. No. SK No 131030 A (2021).
- Putri, J. C., & Riyadh, A. (2024). Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata Di Wisata Taman Ghanjaran Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas. *Jurnal Kelitbangan*, 9(1), 186–198.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta Bandung.
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Vidayanti, V. C., Hindarti, S., & Khairiyah, N. (2024). Strategi Pengembangan Wisata Kopi Kampung Lego di Kelurahan Gombengsari Kabupaten Banguwangi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 12(04), 1–12.
- Wibowo, A. (2023). The Role Of Local Community Participation In The Developing Cultural Tourism Sustainability. *Journal of Management, Business & Social Science*, 5(1), 1–15.
- Yulianto, Y., Safari, T., & Nurcahyo, R. J. (2023). Potensi Agrowisata Kopi Sebagai Daya Tarik Wisata Ekonomi Kreatif Desa Kalibogor Kendal. *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 14(2), 151–160. <https://doi.org/10.31294/khi.v14i2.17093>